

**PERAN UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
PADA BIDANG PERTANIAN DI UGANDA TAHUN 2015 – 2021**

Fiki Rahmatina Nihriroh

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: 151190112@student.upnyk.ac.id

Dr. Iva Rachmawati, M.Si

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: iva.rachmawati@upnyk.ac.id

Abstrak

Uganda merupakan negara yang belum memiliki kestabilan politik dan ekonomi yang membuat pemerintah memprioritaskan perkembangan ekonomi, serta politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Secara tidak langsung pemerintah mengesampingkan permasalahan lain seperti pemberdayaan perempuan. Uganda baru menyadari bahwa adanya korelasi antara pemberdayaan perempuan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, diskriminasi perempuan masih terjadi pada beberapa bidang, salah satunya yakni pertanian. Berdasarkan kondisi perempuan tersebut, UN Women hadir ke Uganda untuk membantu mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang dirancang. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bekerja pada bidang pertanian di Uganda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer guna menganalisis peran UN Women. Hasil penelitian ini akan menjelaskan upaya yang dilakukan UN Women melalui program yang dirancang guna membuat perempuan Uganda berdaya.

Kata kunci: UN Women, Organisasi Internasional, Uganda, Pemberdayaan Perempuan

Abstract

Uganda is a country that does not yet have political and economic stability, which makes the government prioritize economic development, as well as politics to catch up with other countries. Indirectly, the government puts aside other issues such as women's empowerment. Uganda has just realized that there is a correlation between women's empowerment and political and economic stability. However, discrimination of women still occurs in several fields, one of which is agriculture. Based on the condition of these women, UN Women came to Uganda to help seek women's empowerment through various programs designed. This research aims to analyze the role of UN Women in economic empowerment efforts for women working in agriculture in Uganda. The research method used is a qualitative research method with the concept of international organizations proposed by Clive Archer to analyze the role of UN Women. The results of this study will explain the efforts made by UN Women through programs designed to make Ugandan women empowered.

Keywords: UN Women, International Organizations, Uganda, Empowering Women.

PENDAHULUAN

Perempuan hampir di seluruh dunia saat ini masih mengalami ketimpangan dalam bidang ekonomi (UN Women, 2016). Bahkan, di sebagian besar dunia, perempuan hampir tidak hadir atau kurang terwakili dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk perumusan kebijakan keuangan. Selain itu, akses untuk perempuan berpartisipasi dalam bidang ekonomi juga masih rendah. Kesenjangan dan ketidaksetaraan gender membuat perempuan-perempuan khususnya di negara berkembang mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Uganda merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Timur, yang masih mengalami konflik internal, sehingga belum tercapainya stabilitas politik serta ekonomi. Kondisi ekonomi Uganda mengalami penurunan yang signifikan saat *National Resistance Movement* (NRM) mengambil alih pemerintahan negara melalui perang sipil yang terjadi pada tahun 1986. Kondisi tersebut terus berlanjut karena pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2003, masyarakat sipil Uganda yang berpenghasilan sangat rendah atau di bawah garis kemiskinan, meningkat persentasenya dari 34% menjadi 38% (Ellis, 2005). Hal ini

menyebabkan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) Uganda pada awal tahun 2000-an. Kondisi perekonomian yang cukup serius ini menyebabkan pembangunan terhambat serta maraknya tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Uganda terus mencoba mengembangkan sektor prioritas, sehingga permasalahan yang bersifat minor seperti pemberdayaan perempuan kurang mendapatkan perhatian.

United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment Empowerment of Women (UN Women) terbentuk pada tahun 2010 sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk mengkampanyekan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan. UN Women hadir di 52 negara yang terdiri dari, 20 diantaranya negara yang berada di kawasan Afrika. UN Women membantu perempuan di berbagai negara tersebut untuk mengurangi angka diskriminasi, meningkatkan partisipasi perempuan dan melakukan pemberdayaan. Dalam hal ini UN Women sebagai organisasi internasional yang menaungi bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hadir untuk membantu permasalahan yang dialami oleh Uganda.

Pada permasalahan yang terjadi di Uganda, UN Women menjadi rekan kerja negara atau pemerintah guna membantu memberdayakan perempuan. Kehadiran UN Women bukan untuk memenuhi panggilan atau tawaran yang diberikan oleh pemerintah negara, melainkan hadir dengan tanpa undangan untuk mengimplementasikan program yang mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Reliefweb, 2006). Namun, terdapat hal yang mempengaruhi kehadiran UN Women yakni pada tahun 2006 *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) terlebih dahulu memiliki program terkait *promoting gender equality* di Uganda. Setelah itu, UN Women hadir untuk melanjutkan program kerja tersebut salah satunya yakni *The United Nations Joint Programme for Gender Equality* atau UNJPGE (UN Women). UN Women tidak hanya

melanjutkan program yang dimiliki oleh UNIFEM, melainkan juga merancang strategi dan program yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Seiring dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di lingkup internasional, Pemerintah Uganda mulai menyadari bahwa adanya korelasi antara kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan, apabila masih tingginya tingkat kesenjangan gender dan ketidakberdayaan perempuan, maka akan berdampak pada banyaknya angka pengangguran. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai, karena minimnya masyarakat sipil yang terlibat dalam perekonomian negara (Eastin & Prakash, 2013). Hal ini yang terjadi di Uganda, terutama pada bidang pertanian yang menyumbang proporsi pekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Perempuan Uganda yang bekerja dalam bidang pertanian sebesar 70% dari jumlah total pekerja. Namun, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam produktivitas pertanian masih terjadi. Perempuan di Uganda memiliki akses yang jauh lebih rendah ke alat-alat pertanian dan perempuan hanya bisa menggunakan teknologi pertanian tingkat rendah seperti, pestisida dan pupuk anorganik. Rendahnya akses yang dimiliki oleh perempuan mengakibatkan tidak maksimalnya proses produksi, sehingga pendapatan serta keuntungan yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan.

Petani perempuan di Uganda terkendala oleh kepemilikan sumber daya tanaman yang tidak aman, pembagian keuntungan yang tidak adil, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, pendidikan rendah dan kurangnya bahan tanam. Perempuan terbatas menanam tanaman sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik tanah yang mayoritas merupakan laki-laki. Ketimpangan yang dialami oleh petani perempuan, mengakibatkan peran besar mereka dalam bidang pertanian tidak mendapatkan hasil yang signifikan bagi perekonomian negara. Hal ini akan berdampak pada angka PDB

negara, karena pertanian merupakan sektor utama bagi perekonomian Uganda (MAAIF, 2017) Kurangnya partisipasi perempuan dalam menyatakan pendapat dan mengambil keputusan membuat petani perempuan Uganda tidak berdaya.

Merujuk pada kondisi yang dialami oleh perempuan Uganda dalam bidang pertanian, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang mereka alami. UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengupayakan kesetaraan gender dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perempuan di Uganda. UN Women berperan dalam merancang dan menyusun program-program untuk meningkatkan kesetaraan gender, menghapus diskriminasi, dan melaksanakan pemberdayaan perempuan di Uganda, termasuk dalam bidang pertanian. Tujuan dari riset ini adalah guna menganalisis peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pada bidang pertanian di Uganda.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional guna menganalisis peran UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda. Konsep organisasi internasional dapat dikatakan merupakan konsep yang dapat dikatakan baru. Hal ini mengacu pada fenomena yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II di mana, hubungan internasional dilingkupi oleh aktor negara yang menjadi aktor tunggal. Pada awalnya, interaksi dan hubungan yang terjadi dalam sistem politik dunia hanya terbatas pada negara satu dengan negara lain. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap negara. Negara di dunia mulai memiliki keinginan untuk bekerja sama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara yang menjadi anggota. Aktor lain mulai bermunculan setelah Perang Dunia, termasuk organisasi internasional, karena muncul kesadaran bahwa guna menciptakan dunia yang damai tanpa adanya konflik dengan menjaga hubungan baik antar negara.

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional diklasifikasikan menjadi tiga. Pembagian ini meliputi beberapa unsur seperti, tugas, tujuan, kewenangan, serta aktivitas yang dilakukan. Tiga peran utama organisasi internasional, yaitu: (Archer, 1995)

a. Instrumen

Organisasi Internasional sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional negara. Dalam hal ini organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan tertentu negara mengenai kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah politik.

b. Arena

Organisasi internasional sebagai arena atau wadah penyediaan tempat untuk kegiatan yang berlangsung. Organisasi Internasional sebagai tempat mempertemukan negara-negara di dunia yang menjadi anggota untuk merancang ataupun mendiskusikan kebijakan atau isu yang menjadi pokok pembahasan.

c. Aktor Independen

Organisasi internasional sebagai aktor independen bermakna, suatu organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri atau independen tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Meskipun, pernyataan ini menimbulkan kontra, karena bagaimanapun organisasi internasional tidak terlepas dari negara anggotanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi internasional memiliki kekuatan untuk mengambil sebuah keputusan atau pun tindakan yang dapat mempengaruhi anggotanya.

Berdasarkan klasifikasi Clive Archer tersebut, UN Women memenuhi dua dari tiga peran dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam bidang pertanian di Uganda. UN Women memenuhi peran sebagai instrument dengan membantu menyusun strategi *Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector* (GECAS) untuk periode 2016/2017 – 2019/2020 (UN Women, 2017). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya yang dikelola oleh perempuan di Uganda. Selain GECAS, UN Women juga menyusun *Contributing to the Economic Empowerment of*

Women in Africa through Climate Smart Agriculture yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang pertanian yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan akses ke pasar (UN Women) Dua program tersebut, memiliki tujuan yang selaras yakni untuk meningkatkan produktivitas pertanian petani perempuan, agar mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Beberapa pihak telah melakukan penelitian mengenai implementasi mengenai peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Cliver Archer. Penelitian pertama yang berhasil ditemukan yakni skripsi yang ditulis oleh Nesia Maya Mahardika yang berjudul "Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda (2014 – 2021)" (Mahardika, 2021). Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dan fungsi yang diklasifikasikan oleh Clive Archer, mampu menganalisis upaya yang dilakukan UN Women di Uganda. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, melainkan dalam implementasi setiap perannya memuat bidang yang berbeda-beda. Penulis dalam penelitian ini menyatakan, bahwa UN Women memenuhi tiga peran dan sembilan fungsi. Salah satu peran, yakni Instrumen menjelaskan bahwa UN Women memiliki andil dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi melalui program yang dirancang.

Penelitian kedua yakni, jurnal skripsi yang ditulis oleh Nurul Fazriah Ramadhan dengan judul "Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016 - 2019" (Ramadhan, 2023). Dalam penelitian ini, penulis fokus mengkaji peran UN Women guna memberantas kekerasan seksual yang masih kerap terjadi di Indonesia. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional guna menganalisis peran UN Women melalui program yang dibuat, maupun menjalin kerjasama dengan pihak domestik.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah riset, metode penelitian merupakan hal penting karena menjadi cara untuk mempermudah jalannya penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan secara luas berkaitan dengan strategi analisis yang mana bukan berdasarkan data numerik. (Lamont, 2015) Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati, dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian yang selanjutnya digambarkan semestinya. (Bogdan & Taylor, 1984)

PEMBAHASAN

Kondisi Perempuan Uganda di Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menunjang angka PDB Uganda. Sektor pertanian menghadirkan banyak peluang bagi investor yang memberikan keuntungan (MAAIF, 2017). Proporsi populasi pekerja terbesar di Uganda berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni, 65%. Dari seluruh jumlah tersebut, pekerja perempuan yang terlibat yakni 70% (UNHS 2016/2017). UN Women selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ikut serta dalam upaya implementasi SDGs poin ke-5 dengan memfasilitasi partisipasi perempuan salah satunya di bidang pertanian. Kondisi perempuan di Uganda masih mengalami diskriminasi baik dalam pengelolaan lahan, hingga pemasaran produk hasil panen.

Pemerintah Uganda telah melakukan beberapa cara, salah satunya dengan perumusan kebijakan *The Constitution of the Republic of Uganda 1995* yang telah diamandemen sehingga, di dalam Bab Empat memberikan hak untuk kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi, memberikan perlindungan dari perampasan hak milik dan hak atas privasi orang, baik itu rumah dan harta benda lainnya (The Constitution of The Republic of Uganda, 1995). Selain itu, Pemerintah Uganda pada akhir tahun 1990-an merancang *Land Act 1998* selanjutnya diamandemen pada tahun 2004, yang mana sebelum pengesahan Undang-Undang tersebut para aktivitas perempuan di Uganda

mengupayakan pencantuman pasal yang menghapus diskriminasi terhadap kepemilikan tanah bagi perempuan di Uganda.

Namun, masyarakat Uganda masih berpedoman dengan hukum adat, kebiasaan, dan tradisi yang secara sadar melakukan diskriminasi terbuka, sehingga menciptakan status yang lebih rendah bagi perempuan dan mencegah mereka untuk menikmati hak asasi mereka secara setara dengan laki-laki. Meskipun sebelum periode tahun 2000-an undang-undang telah dibuat, dalam praktiknya, perempuan didiskriminasi dan diperlakukan tidak setara dengan laki-laki (Justus, 2019). Hak-hak perempuan di bawah hukum adat, menunjukkan bahwa fakta di bawah perempuan hampir tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya bisa mengakses tanah untuk budidaya dan bertani (Kombe, 2016).

Perempuan memainkan peran penting dalam sektor pertanian dan menyumbang bagian yang lebih tinggi dari rata-rata tenaga kerja tanaman di Uganda. Perempuan di Uganda dalam sektor pertanian terus mengalami tantangan, terutama dalam mengakses sumber daya yang bersifat produktif termasuk tanah, kredit atau modal dan ekstensi layanan. UN Women pada awal terbentuknya, melakukan riset dan analisis di Malawi, Tanzania dan Uganda pada tahun 2015, mengenai gender dalam produktivitas pertanian diperkirakan dari 13% sampai 28% di Uganda dengan biaya tahunan \$145 juta (UN Women, 2015). Perempuan menghasilkan rata-rata 17% lebih sedikit per hektar petak yang dikelola oleh laki-laki atau bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah kontribusi pekerja perempuan dalam sektor pertanian.

Perempuan tergolong sebagai lebih dari separuh tenaga kerja pertanian Uganda, dan proporsi perempuan yang bekerja di pertanian lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan juga bertanggung jawab atas penyediaan produksi pangan konsumsi sebesar 80%, menyediakan tenaga kerja untuk produksi tanaman komersial sekitar 50% tenaga kerja, yang mana apabila diakumulasikan sekitar 70% tenaga kerja di bidang pertanian berasal dari perempuan. Namun, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam produktivitas pertanian terjadi ketika kepemilikan tanah tidak sebanding dengan

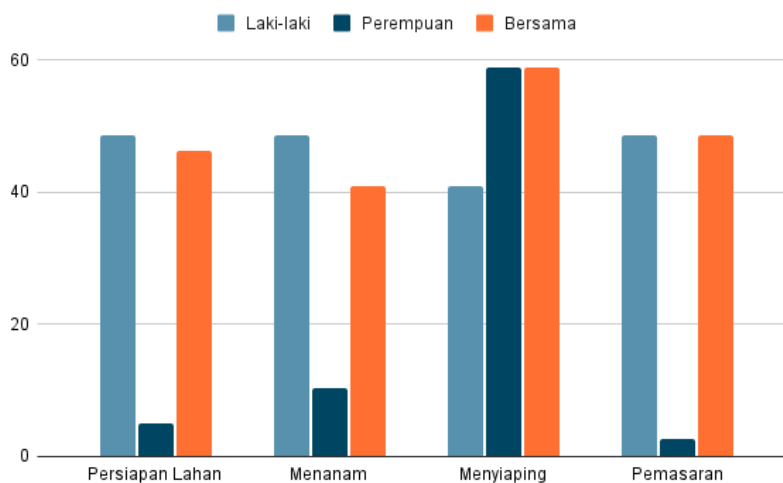
jumlah pekerja perempuan dalam bidang pertanian. Perempuan di Uganda memiliki akses yang jauh lebih rendah ke alat-alat pertanian dan perempuan hanya bisa menggunakan teknologi pertanian tingkat rendah seperti, pestisida dan pupuk anorganik (UN Women, 2018). Rendahnya akses yang dimiliki oleh perempuan mengakibatkan tidak maksimalnya proses produksi, sehingga pendapatan serta keuntungan yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan.

Berkaitan dengan kepemilikan tanah statistik hanya menunjukkan 27% dari tanah yang terdaftar dimiliki oleh perempuan, padahal 70% perempuan terlibat dalam bidang pertanian (Justus, 2019). Bahkan, 80% dari perempuan biasanya tidak memiliki hak atau wewenang tentang bagaimana beberapa properti termasuk tanah, dikelola atau digunakan kecuali mereka telah menyewanya. Ketidaksetaraan akses tanah bagi perempuan Uganda berdampak pada penjualan hasil tani ke pasar. Menurut penelitian dari Uganda Vigneri, partisipasi perempuan dalam pemasaran komoditas kopi dinilai kurang, dikarenakan mereka hanya memiliki sepetak kecil tanah yang menyebabkan produk tani yang dihasilkan sedikit (Twinorugyendo, 2019). Ketidaksetaraan gender yang dialami oleh petani perempuan di Uganda, disebabkan ukuran kecil dan kualitas lahan yang buruk, sehingga membuat produktivitas pertanian yang dikelola perempuan 30,6% lebih sedikit dibanding laki-laki (Mukasa, 2015).

Petani perempuan di Uganda terkendala oleh kepemilikan sumber daya tanaman yang tidak aman, pembagian keuntungan yang tidak adil, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, pendidikan rendah dan kurangnya bahan tanam (Twinorugyendo, 2019). Komoditas pertanian atau perkebunan yang ditanam dan dikelola oleh perempuan dengan laki-laki juga dibedakan jenisnya. Laki-laki erat kaitannya dengan tanaman jagung ataupun kopi, sementara perempuan menanam tanaman pangan dan sayuran. Hal ini berkaitan dengan kopi merupakan komoditas unggulan sebagai hasil panen dengan ekspor tertinggi di Uganda, sehingga laki-laki menggunakan kekuatannya sebagai kepala rumah tangga untuk mengatur komoditas yang ditanam oleh perempuan (Bunn, 2019).

Diskriminasi lain yang dialami oleh perempuan dalam bidang produktivitas pertanian, yakni pada tingginya biaya transportasi dan terbatasnya mobilitas bagi perempuan untuk mencapai pasar guna memasarkan hasil panen. Sulitnya akses transportasi yang dimiliki oleh perempuan juga didasari terhadap kepemilikan kendaraan bagi petani perempuan. Hal ini berkaitan dengan norma tradisional yang berkembang di lingkungan masyarakat Uganda, dimana kendaraan seperti sepeda jarang dimiliki oleh perempuan. Perempuan juga harus mendapatkan izin dari kepala rumah tangga untuk bisa. Akibatnya, perempuan tidak memiliki akses yang cukup dan memadai untuk memasarkan hasil panennya ke pasar-pasar tradisional yang letaknya di luar tempat tinggal mereka. Selain dalam hal transportasi, sulitnya akses untuk mendapatkan kredit juga menjadi kendala yang dialami oleh perempuan untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Petani perempuan di Uganda merasa membutuhkan kredit sebagai modal untuk membeli bahan tanam dan pestisida untuk lahan mereka. Sulitnya akses kredit modal secara tidak langsung membatasi kemungkinan petani perempuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka (UBOS, 2012).

Grafik. 1. Perbandingan Aktivitas Pertanian yang Dikelola oleh Laki-laki dan Perempuan (%)



Sumber: Uganda Bureau of Statistics. (2012). *Agricultural Sector*. Kampala: UBOS.

Berdasarkan Grafik 1, aktivitas pertanian dominan dilakukan oleh laki-laki. Dalam aktivitas guna mempersiapkan lahan pertanian, laki-laki memiliki rasio 48.7%, sementara bagian perempuan hanya memiliki rasio sebesar 5.1% dan rasio melakukannya secara bersama-sama 46.2%. Pada aktivitas menanam, rasio laki-laki 48.7%, sementara perempuan 10.3% dan dilakukan secara bersama sebesar 41%. Kesenjangan yang mencolok terlihat pada aktivitas pemasaran/marketing, rasio laki-laki sebesar 48.7%, sementara perempuan hanya 2.6% dan pemasaran yang dilakukan bersama dalam jumlah 48.7%. Namun, pada aktivitas menyiangi atau membersihkan gulma dan menggemburkan tanah, perempuan memiliki pembagian yang lebih besar yakni, 59%, sementara laki-laki 41% dan apabila dilakukan secara bersama memiliki rasio yang sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini membuktikan dominasi laki-laki di Uganda terhadap produktivitas pertanian, dimana laki-laki mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding perempuan, karena pemasaran dikuasai oleh laki-laki (UBOS, 2012).

Peran UN Women sebagai Arena

UN Women sebagai entitas yang berada di bawah naungan PBB yang memiliki wewenang dan misi untuk mengupayakan gender equality dan pemberdayaan bagi perempuan di seluruh dunia. Clive Archer mengklasifikasikan dalam tiga bentuk peran yakni, Instrumen, Arena, dan Aktor Independen. Peran yang diupayakan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Uganda, terutama dalam bidang pertanian. Pekerja perempuan di bidang pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap produktivitas hasil panen, akan tetapi timbal balik seperti pendapatan tidak didapatkan sebagaimana mestinya.

Peran organisasi internasional pertama yakni, sebagai arena yang memiliki makna menjadi wadah penyediaan tempat untuk kegiatan yang berlangsung. Organisasi Internasional sebagai tempat mempertemukan negara-negara di dunia yang menjadi anggota untuk merancang ataupun mendiskusikan kebijakan atau isu yang menjadi pokok pembahasan. Peran sebagai arena bagi organisasi internasional yang seluruh anggotanya terdiri dari negara-negara, sering disamakan dengan diplomasi bilateral

yang melibatkan beberapa negara. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa organisasi internasional sebagai arena berarti bersifat netral dan tidak memihak anggota manapun. Organisasi internasional memenuhi perannya dengan memberikan anggotanya kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan saran dari perspektif masing-masing dalam suatu arena atau forum yang lebih terbuka dibanding dengan diplomasi bilateral. Proses komunikasi pada pertemuan atau forum tersebut sebisa mungkin dihadiri oleh banyak negara anggota organisasi internasional dengan detail aturan serta informasi wajib disampaikan secara terbuka. Hal ini yang disebut dengan prinsip netral dan terbuka.

Sebagai organisasi internasional, UN Women berperan untuk menyediakan fasilitas penunjang penyelesaian masalah sehingga mampu merealisasikan tujuan dasar dari organisasi maupun negara-negara anggotanya. Dalam hal ini UN Women sebagai sarana atau wadah bagi Pemerintah Uganda untuk mengikuti kegiatan yang bersifat antar negara, seperti pertemuan, konferensi, dan workshop internasional yang membahas mengenai isu pemberdayaan ekonomi perempuan terutama dalam bidang pertanian. UN Women memenuhi perannya sebagai arena untuk mempertemukan anggotanya agar bisa mengemukakan pandangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah Uganda memanfaatkan peran UN Women sebagai untuk bertemu dengan negara-negara maju maupun berkembang lain guna mendapatkan pandangan yang mampu membantu melancarkan program negaranya.

Salah satu pertemuan yang diikuti oleh Pemerintah Uganda yakni, "*Financing for Gender Equality-Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa*" yang diselenggarakan pada 14 Juli 2015 di Addis Ababa, Ethiopia. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk berbagi informasi terkait dengan contoh penerapan kebijakan, undang-undang, program, alokasi sumber daya, hingga dana yang dibutuhkan untuk upaya pemberdayaan perempuan (UN Women, 2015). Pertemuan ini melibatkan beberapa anggota di wilayah Afrika, mulai dari negara maju hingga berkembang, sehingga forum tersebut mampu memberikan manfaat bagi peserta untuk

mendapatkan informasi, pandangan, hingga saran dari berbagai pihak yang terlibat. Informasi ini akan digunakan oleh Pemerintah Uganda untuk memperbaiki kondisi pembiayaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk dalam bidang pertanian. Hal ini berdasarkan kondisi perempuan di bidang pertanian yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas keuangan yang baik, sehingga tidak bisa meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Gambar 1. Delegasi *UN Women*, UNDP, Pemerintah Negara Terpilih, dan Organisasi Lain yang Menghadiri Konferensi *Financing for Gender Equality Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa*.



Sumber: United Nations. 2015. "Third International Conference on Financing for Development, Addis Ababa Concept Note – Financing for Development Side Event."

https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/CN_side-event-

[FFD3 MoWCYA-UNW 29.06.2015.pdf](#) Diunduh pada 29 Maret 2023.

Konferensi tersebut terbagi menjadi tiga rangkaian agenda acara sampingan. Agenda pertama membahas mengenai pembiayaan untuk kesetaraan gender. Pada topik agenda ini dibutuhkan komitmen untuk mencapai SDGs melalui agenda pembiayaan yang sama tingkat ambisinya yang mampu menguntungkan berbagai pihak. Melalui konferensi ini Presiden Bank Dunia yang menjabat di periode tersebut, Jim Yong Kim mengatakan kesetaraan gender bukan hanya syarat keadilan sosial, melainkan juga

sebagai kekuatan yang dapat mewujudkan keadilan sosial itu sendiri (UN Women, 2015). Agenda yang kedua yakni, membahas mengenai *Transformative Financing for Gender Equality and Women's Empowerment- Catalyzing Action* yang mana beberapa panelis dari negara anggota dan organisasi mitra berbagi contoh terkait penerapan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mulai dari kebijakan, undang-undang, program alokasi sumber daya serta kebutuhan dalam upaya tersebut. Pada agenda ini, beberapa pihak memberikan pernyataan bahwa uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan merupakan uang yang cerdas, yang mana untuk mencapai kesetaraan gender, perlu adanya tindakan yang ditargetkan, sehingga pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dapat tercapai.

Agenda terakhir pada konferensi *Financing for Gender Equality Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa* adalah *Financing for Gender Equality- Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa*. Pada agenda sampingan ini, secara kontekstual mendiskusikan mengenai pembiayaan transformatif untuk pemberdayaan perempuan dengan menyatukan stakeholder dari setiap pemerintah negara, sistem United Nations, masyarakat, dan organisasi masyarakat untuk membahas cara-cara inovatif terkait pembiayaan tersebut. Hasil dari konferensi ini diselaraskan oleh Pemerintah Uganda dan UN Women dalam *National Development Plan II* (NDP II).

Berkaitan dengan peran UN Women sebagai arena, menurut Budlender dan Hewitt penganggaran dan pendanaan yang responsif berkaitan dengan gender merupakan alat guna mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas yang sama bagi perempuan dan laki-laki (Budlender, Hewitt, 2003). Alokasi pembiayaan atau pendanaan dalam upaya mendukung kesetaraan dan pemberdayaan gender, dapat diberikan untuk perempuan yang bekerja di bidang pertanian. Hal ini selaras dengan Uganda yang merupakan negara dengan jumlah pekerja perempuan di bidang pertanian terbesar di kawasan, yang persentasenya mencapai 70 %.

Peran UN Women sebagai Instrumen

Mengacu pada kondisi perempuan Uganda yang mengalami kesenjangan dalam bidang pertanian, seperti upah dan akses terhadap kredit, maka perlu adanya bantuan secara materiil bagi perempuan untuk bisa lebih berdaya. Melalui konferensi yang diwadahi oleh UN Women, Pemerintah Uganda mampu mendapatkan ilmu atau informasi yang bisa menjadi ide untuk merancang strategi ataupun program guna meningkatkan partisipasi petani perempuan dalam bidang ekonomi. Hal terpenting yang tidak bisa dikesampingkan yakni, berkaitan dengan pembiayaan atau pendanaan bagi perempuan untuk mengembangkan perekonomian mereka, seperti contoh dalam pertanian agar produktivitas hasil panen bisa meningkat petani perempuan membeli alat tani yang didukung oleh teknologi canggih. Pembiayaan yang diperuntukan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi umpan balik dengan menjadikan perempuan lebih berdaya dalam bidang ekonomi (UN Women, 2016).

UN Women memenuhi perannya sebagai instrumen dengan menyusun program dan strategi guna mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan perekonomian perempuan dalam bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor penting dan utama dalam mendorong pendapatan dan perekonomian Uganda. Sektor pertanian menjadi salah satu penelitian utama bagi UN Women untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang memiliki peran kunci dalam keberhasilan pertanian Uganda. Sektor pertanian menyumbang 72 % dari total jumlah pekerja di Uganda, yang mana 70% merupakan pekerja perempuan. Perempuan yang bekerja pada sektor ini tidak memiliki cukup akses untuk memasarkan hasil produktivitas pertaniannya (UN Women, 2015).

Perempuan Uganda sulit untuk meningkatkan produktivitas pertanian, karena dipengaruhi oleh tidak adanya kepemilikan lahan dan akses terhadap alat teknologi pertanian (UN Women, 2015). Menurut riset Karen Ann McKenna, pertanian Uganda memiliki akses yang terbatas dalam menggunakan dan mengelola lahan pertanian, karena mereka masih menggunakan metode pertanian tradisional. Petani perempuan Uganda tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan membeli teknologi pertanian yang lebih baik, sebagai contohnya perempuan masih menggunakan cangkul tangan

untuk membersihkan lahan, karena keterbatasan akses untuk menyewa bajak sapi atau tractor (McKenna, 2014). Maka dari itu, UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender turut membantu Pemerintah Uganda dalam menyusun program guna menghapus kesenjangan gender dalam bidang pertanian, serta meningkatkan perekonomian perempuan yang bekerja pada sektor tersebut.

Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector (GECAS) diresmikan sebagai tindakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh UN Women yakni, *The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity* di Malawi, Tanzania dan Uganda (UN Women, 2018). Pengakuan terhadap kontribusi perempuan yang signifikan terhadap ketahanan pangan, serta kekuatan ekonomi melalui partisipasi dalam bidang pertanian, menjadi salah satu target untuk mencapai SDGs poin ke-5. Maka dari itu, kesetaraan bagi perempuan dalam bidang pertanian perlu ditingkatkan, salah satunya melalui program ini. GECAS disusun untuk periode tahun 2016/2017 hingga 2019/2020.

Program GECAS memiliki objektif sektor yang pertama yakni, meningkatkan produktivitas pertanian (UN Women, 2018). Salah satu cara yang dilakukan yakni, meningkatkan akses terhadap *agricultural finance services* terutama bagi perempuan. Fleksibilitas struktur dan persyaratan bagi perempuan yang ingin mengakses kredit untuk meningkatkan hasil panen diupayakan melalui program ini. Selain itu, GECAS mengukung adanya kemudahan akses bagi perempuan untuk mencapai pasar dan mengembangkan infrastruktur pertanian terutama yang berkaitan dengan teknologi. Indikator ini didukung dengan adanya pelatihan keterampilan dan teknologi yang diperlukan untuk memitigasi tantangan perubahan iklim melalui penggunaan metode pengeringan matahari, pemindahan kandang ke perairan berkualitas lebih baik, memperkenalkan garam batu untuk mengurangi serangan parasit di antara teknik lainnya.

Objektif sektor GECAS yang kedua yakni, meningkatkan akses untuk pertanian kritis. Pengembangan kualitas akses material pembibitan dan penanaman tanaman. Selain itu, upaya UN Women melalui indikator ini guna meningkatkan akses fertilisasi, hingga irigasi terhadap lahan pertanian yang dikelola oleh perempuan. Hal ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh petani perempuan Uganda yang memiliki akses minim

terhadap kepemilikan alat dan material pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Sementara, objektif sektor GECAS yang ketiga berkaitan dengan pengembangan pasar pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian. Indikator ini diupayakan sebagai bentuk dukungan bagi petani perempuan untuk mengakses kredit dan kemampuan finansial untuk mengembangkan pertanian mereka. Objektif sektor GECAS yang terakhir yakni, berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam bidang pertanian di Uganda. Kelembagaan atau asosiasi petani perempuan ini diupayakan untuk mampu bersikap responsif dengan berkolaborasi dengan UBOS untuk memastikan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian tanpa terbatas pada gender.

Selain GECAS, UN Women merumuskan program *Contributing to the Economic Empowerment of Women in Africa through Climate Smart Agriculture*. Program ini membantu Pemerintah Uganda untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang pertanian yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan minimnya akses ke pasar (UN Women). Kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam produktivitas pertanian terjadi ketika kepemilikan tanah tidak sebanding dengan jumlah pekerja perempuan dalam bidang pertanian. Perempuan di Uganda memiliki akses yang jauh lebih rendah ke alat-alat pertanian dan perempuan hanya bisa menggunakan teknologi pertanian tingkat rendah seperti, pestisida dan pupuk anorganik (UN Women, 2018). Oleh karena itu, program ini berupaya untuk mengurangi angka kesenjangan gender dalam produktivitas pertanian.

UN Women memiliki strategi untuk menyongsong perubahan melalui program ini, antara lain : (UN Women, 2015)

- a. Menciptakan kebijakan *smart climate* dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemilikan tanah dengan membangun kemauan politik dan menangani norma sosial serta adat yang diskriminatif. Cara yang dilakukan oleh UN Women yakni, memfasilitasi reformasi Undang-Undang dan hukum adat terkait kebijakan yang menghambat akses perempuan terhadap tanah.

- b. Meningkatkan akses petani perempuan terhadap iklim informasi smart climate dengan memperkuat kapasitas pertanian dan memastikan informasi terkait layanan dapat diakses oleh petani perempuan sehingga mampu meningkatkan produktivitas mereka.
- c. Meningkatkan akses keuangan petani perempuan untuk berinvestasi dalam bidang pertanian yang melahirkan praktek peminjaman di lembaga keuangan publik maupun swasta, termasuk pinjaman terarah, langsung, hingga mekanisme kredit.
- d. Meningkatkan akses petani perempuan menuju nilai tambah produk yang lebih tinggi di pasar. Cara yang dilakukan yakni mendukung terbentuknya koperasi petani perempuan yang akan memperkuat kapasitas dan partisipasi pada rantai nilai hijau. Hal ini berkaitan dengan akses preferensial melalui kuota, target, dan pembebasan pajak untuk koperasi perempuan yang mungkin diperlukan. Investasi ini akan dibutuhkan dalam infrastruktur lokal, termasuk penyimpanan pasca panen dan fasilitas pengolahan bagi produktivitas perempuan.

Sejumlah kasus yang terjadi di Afrika Sub-Sahara kendala utama pada kesetaraan gender adalah disebabkan oleh beban dan kekurangan perawatan perempuan yang tidak dibayar sumber daya untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dalam sektor pertanian perlu memprioritaskan beberapa tujuan seperti investasi fasilitas publik seperti listrik dan air bersih, akses untuk mengurangi beban perawatan yang ditanggung oleh perempuan, perluasan kredit kepada petani perempuan dengan menggunakan jaminan pinjaman pemerintah untuk mengatasi kekurangan agunan, serta implementasi dari kuota untuk keterwakilan perempuan di badan-badan yang relevan, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dan Uganda (UN Women, 2016). Berdasarkan riset tersebut, UN Women berhasil dimanfaatkan perannya sebagai instrumen oleh Pemerintah Uganda dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi petani perempuan. Program kolaborasi antara UN Women dengan Pemerintah Uganda, yakni GECAS diselaraskan dengan NDP II yang menjadi tujuan dari negara tersebut.

Program GECAS dilaksanakan dengan menekankan akses yang adil dan inklusif terhadap lahan, layanan, teknologi, dan keuangan pertanian, serta mengatasi diskriminasi perempuan di Uganda (Oxfam, 2021). Pemerintah Uganda mengalokasikan anggaran sebesar UGX 239 Miliar yang diperuntukan untuk bidang pertanian. Dalam hal ini menurut laporan Kementerian Gender, Perburuhan, dan Pembangunan Sosial, dari seluruh dana yang diberikan untuk bidang pertanian, 34,6% dari anggaran tersebut dialokasikan guna program yang responsive terhadap gender. Hal ini, menunjukkan bahwa UN Women memenuhi perannya sebagai instrumen dalam mengatasi permasalahan kesenjangan yang dialami petani perempuan Uganda.

KESIMPULAN

Organisasi internasional memiliki kemampuan dalam membantu negara dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Berdasarkan kondisi yang dialami oleh perempuan Uganda dalam pertanian, UN Women mengupayakan adanya pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan di Uganda. Konsep yang digunakan untuk menganalisis peran UN Women di Uganda adalah konsep organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Peran organisasi internasional terbagi menjadi tiga yakni, instrumen, arena, dan aktor independen. UN Women melalui program-program yang dirancangnya berdasarkan kondisi perekonomian perempuan Uganda dalam bidang pertanian berhasil memenuhi dua dari tiga peran yang diklasifikasikan oleh Clive Archer.

Sebagai negara yang mengamalkan nilai-nilai tradisi, perempuan di Uganda juga banyak terkurung oleh beberapa adat yang berkembang di masyarakat sekitar. Perempuan dalam bidang pertanian kesulitan mengakses kepemilikan lahan yang berakibat pada keterbatasan dalam mengembangkan pertaniannya dan mendapatkan kredit modal. Petani perempuan Uganda hanya diperbolehkan menanam komoditas tertentu seperti tanaman sayur dan buah, karena komoditas unggulan ditanam oleh laki-laki. Kondisi kesenjangan yang dialami oleh petani perempuan Uganda ini

mengakibatkan tidak optimalnya peran perempuan yang mendominasi sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi negara.

UN Women memenuhi peran pertama yakni, sebagai arena dengan memfasilitasi pertemuan yang bertemakan "*Financing for Gender Equality - Placing Women at the Centre of the SDGs in Africa*". Pertemuan ini membahas mengenai pembiayaan untuk upaya pemberdayaan perempuan, yang diikuti oleh Uganda dan seluruh anggota UN Women. Forum tersebut juga membahas mengenai pentingnya pembiayaan bagi perempuan, guna mendukung program SDGs poin kelima. Melalui konferensi tersebut, UN Women berhasil menjadi wadah bagi Pemerintah Uganda untuk mendapatkan ilmu dan saran mengenai pembiayaan guna pemberdayaan perempuan.

UN Women sebagai instrumen yakni, mampu merumuskan dan merancang strategi *Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector (GECAS)* diresmikan sebagai tindakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh UN Women yakni, *The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity* di Malawi, Tanzania dan Uganda. UN Women berhasil membantu pemerintah Uganda untuk menyelaraskan indikator yang ada di GECAS dengan *National Development Plan II* yang dirancang oleh pemerintah. Salah satu dampak implementasi GECAS yakni, alokasi dana bagi pertanian berbasis gender yang mengoptimalkan peran perempuan.

Dalam riset ini, temuan yang didapatkan yakni, dari tiga peran yang diklasifikasikan oleh Clive Archer, UN Women hanya memenuhi dua peran dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pada bidang pertanian di Uganda. Peran UN Women sebagai instrumen menjadi peran yang dominan dengan menghasilkan dua kebijakan guna meningkatkan produktivitas pertanian yang dikelola oleh perempuan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2021. Strategi dan kebijakan yang dirancang oleh UN Women mampu membuat perempuan memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian dengan baik, dan memiliki dana untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka, sehingga petani perempuan Uganda bisa lebih berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Quisumbing, L, Pandolfelli. (2010). "Promising Approaches to the Needs of Poor Female Farmers: Resources, Constraints, and Interventions." *World Development*. Vol 38, No 4. Hal. 586.
- Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. Third Edition. New York: Routledge. Hal 2
- Bennet, A L. (1995). *International Organization: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall. Hal 2-3.
- Budlender, D. Hewitt, G. (2003). *Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets*. London: Commonwealth Secretariat. Hal 4.
- Christoper Lamont. (2015). *Research Methods in International Relations*. Edition. Los Angeles: Sage Publications. Hal 78.
- Ellis, A., Manuel, C., Blackden, C. M. (2006). *Economic Growth in Uganda: Unleashing the Power of Women*. Washington: The World Bank. Hal 2.
- Elampaire, Eldidah. (2019). "Gender in climate change, agriculture, and natural resource policies: insights from East Africa." <https://dnb.info/1199244740/34>
- Gemelli, Marcella C. (2023). "United Nations Development Fund for Women." <https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Development-Fund-for-Women>
- Government of Uganda. (2015). "Second National Development Plan 2015/16 – 2019/20." <http://npa.go.ug/wp-content/uploads/NDPII-Final.pdf#>
- Helen Hintjens. (2008). "UNIFEM, CEDAW and the Human Rights-based Approach: Assessment: UNIFEM, CEDAW and the Human Rights-based Approach". *Development and Change*. Vol 39, No 6. Hal 1181–1192.
- Leila Hessini. (2020). "Financing for Gender Equality and Women's Rights: The Role of Feminist Funds." *Gender and Development*. Vol 28, No 2. <https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1766830>

- Mahardika, Nesia Maya. (2021). "Peran dan Fungsi *UN Women* dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda (2014-2021)." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mukasa, A., Salami, A., Kayizzi, M., Mugerwa, J. (2015). "Gender Productivity Differentials among Smallholder Farmers in Africa: A Cross Country Comparison." *African Development Research Group Working Paper Series* Vol. 231. No 45.
- Peninnah Twinorugyendo. (2019). "Women Farmers in Uganda: Constraints and Ways Forward." Disertasi. Makerere University. Makerere. Hal 23
- Ramadhan, Nurul Fazriah. (2021). "Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016 – 2019." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- The Constitution of the Republic of Uganda. (1995). http://www.uganda.at/Geschichte/verfassung_der_republik_Uganda_2008.pdf
- Uganda Bureau of Statistics-UBOS. (2017). "Women in Local Government, 2017: Baseline Statistics for Local Council levels III-V in Uganda." https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/04_2019Women_In_Local_Government.pdf
- Uganda Bureau of Statistics. (2016). "Uganda National Household Survey 2016/2017." https://www.ubos.org/wp-content/uploads/2018/03/Uganda_DHS_2016_Report.pdf
- United Nations. (2015). "Third International Conference on Financing for Development, Addis Ababa Concept Note – Financing for Development Side Event." https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/CN_side-event-FFD3_MoWCYA-UNW_29.06.2015.pdf
- UN Women*. (2015). "The Cost of The Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, Tanzania, dan Uganda". <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/10/the-cost-of-the-gender-gap-in-agricultural-productivity-in-malawi-tanzania-and-uganda>
- UN Women*. (2015). "African Union Summit ends with strong call for women's empowerment." <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/02/executive-director-at-2015-au-summit>

UN Women. (2015). "UN Women Steers Three High-level Side events at The Financing for Development Conference."

<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/7/un-women-steers-three-high-level-side-events-at-the-financing-for-development-conference>

UN Women. (2015). "Women's Empowerment Through Climate Smart Agriculture."

<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/FPI%20BriefAgriculture%20LocalUSweb.pdf>

UN Women. (2016). "Transforming Equality UN Women in Eastern and Southern Africa." https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/About%20Us/UN%20Women%20Brief_generic%20pdf.pdf

Diunduh tanggal 31 Januari 2023

UN Women. (2016). "Financing For Gender Equality in The Context of the Sustainable Development Goals."

<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/financing-for-gender-equality-in-the-context-of-the-SDGs.pdf>

UN Women Africa. (2018). "Gender and Equity Compact for the Agriculture Sector (GECAS) 2016/2017-2019/2020."

[https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2018/Gender and Equity Compact Agriculture%2028002%29.pdf](https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2018/Gender%20and%20Equity%20Compact%20Agriculture%2028002%29.pdf)

UN Women. (2018). "Factors Driving the Gender Gap in Agricultural Productivity : Uganda."

<https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2019/uganda-web-LR.pdf>

UN Women Africa. —. "UN Women in Africa." <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do-0>

UN Women Africa. —. "Africa." <https://www.unwomen.org/en/where-we-are/africa>

UN Women. ---. "Climate Smart Agriculture." <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/womens-economic-empowerment/climate-smart-agriculture>